

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas merupakan upaya pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Penyusunan akuntabilitas kinerja dituangkan dalam LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar setiap penyelenggara pemerintah dapat mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*good governance* dan *clean governance*) yang diimplementasikan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan sistem yang berorientasi pada hasil (*Outcomes oriented*), SAKIP diimplementasikan secara “*Self assessment*” oleh masing-masing instansi pemerintah. Instansi Pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur atau mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.

Sebagai salah satu organisasai perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Pemerintah Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar diharuskan untuk dapat mengukur dan mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan membandingkan antara target dan relisasi kinerja. Dengan demikian maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapatperhatian. Karena LKjIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan serta dapat dipergunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan yang telah di rencanakan dan dilaksanakan dalam kurun waktu 1(satu) tahun anggaran.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP) untuk menyajikan pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Dengan adanya LKJIIP Kecamatan dapat mengukur tingkat keberhasilan kinerja dari berbagai faktor baik itu dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sehingga dapat dijadikan tolak ukur dalam mencapai target kinerja yang kemudian bisa dijadikan sebagai perbaikan kinerja untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

1.3. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor.53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025:
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
6. Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor129);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor.64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor

- 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis PEEangkat Daerah Tahun 2018 - 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 162);
 12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 68).

1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar beralamat di Jalan Ronggowarsito Nomor 168, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, email. Karanganyar@karanganyarkab.go.id, website. Karanganyar.karanganyarkab.go.id Kode Pos 57716.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor.117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar mengemban tugas untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah fungsi penunjang. Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar adalah salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang bertugas membantu Bupati. Kecamatan merupakan koodinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

A. Kepegawaian

Kecamatan Karanganyar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

1) Menurut Jabatan/Eselon/JFU :

Jumlah aparatur sipil negara pada Kecamatan Karanganyar sebanyak 14 orang, seperti terinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel.1.4.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/eselon/JFU
Tahun 2023

Unit Kerja	Eselon III	Eselon IV	JFU	Total
1	2	3	4	5
Sekretariat	2	2	3	7
Seksi Tata Pemerintahan	-	1	1	2
Seksi Pemberdayaan Masy Desa	-	1	-	1
Seksi Pelayanan Umum	-	1	-	1
Seksi Kesejahteraan Sosial	-	1	1	2
Seksi Ketentraman dan Ketertiban	-	1	-	1

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Karanganyar (2023)

2) Menurut Golongan :

Berdasarkan golongan kepangkatan, pegawai pada Kecamatan Karanganyar dirinci sebagai berikut :

Tabel.1.4.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Kecamatan Karanganyar
Tahun 2023

No	Golongan	Jumlah	
		L	P
1	Golongan II	1	0
2	Golongan III	4	6
3	Golongan IV	2	1
Jumlah		7	7

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Karanganyar (2023)

3) Menurut Tingkat Pendidikan :

Menurut tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai pada Kecamatan Karanganyar berijazah strata 1 (S1), lebih jelas dirinci pada tabel sebagai berikut :

Tabel.1.4.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kecamatan Karanganyar
Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Jumlah	
		L	P	L	P
1	SMP Sederajat	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	1	0	1	0
3	D3	1	0	1	0
4	S1	3	5	3	5
5	S2	2	2	2	2
Jumlah		7	7	7	7

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Karanganyar (2023)

B. Fungsi Strategis

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan dimaksud perlu dilakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumberdana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Karanganyar adalah :

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran;
3. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

C. Permasalahan Utama yang dihadapi

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Kecamatan Karanganyar dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi;
2. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan;
3. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi/subbag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan;
4. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah desa;
5. Belum optimalnya pemantauan terhadap penyaluran bantuan kesejahteraan sosial;

1.5. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karanganyar adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah
- 1.5. Ssitematika Pelaporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Ringkasan Rencana Kinerja Tahunan
- 2.3. Ringkasan Perjanian Kinerja
- 2.4. Rencana Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Skala Pengukuran
- 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
- 3.3. Pengukuran Kinerja
- 3.4. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Rekomendasi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Karanganyar tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi: “Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: (1) berjuang; (2) bersama; (3) memajukan; (4) Karanganyar. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2018-2023 dan rujukan pada konsep utama RPJPD kabupaten Karanganyar 2005-2025. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pegangan stakeholder terkait untuk menurunkan ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1. Berjuang

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan makna kata “Berjuang” sebagai “berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu; berusaha penuh dengan kesukaran dan bahaya. Dalam konteks kabupaten Karanganyar berarti pemerintah daerah kurun 2018-2023 akan berusaha: (i) mengoptimalkan seluruh kekuatan, dan potensi daerah; (ii) menaklukan segala macam tantangan atau hambatan; serta (iii) memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun kabupaten Karanganyar. Berjuang untuk memenuhi Amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258, yaitu daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan kerja, kesempatan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

2. Bersama

Kata “Bersama” dalam konteks teori *governance* dapat dimaknai sebagai strategi pemerintah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pemenuhan kesejahteraan warga masyarakatnya secara inklusif. Artinya, suatu proses di mana semua pemangku kepentingan saling berinteraksi secara akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pemangku kepentingan (Stakeholder) di sini mencakup: (1) Unsur pemerintah; (2) Unsur DPRD; (3) Unsur dunia usaha dan pers (media); (4) Unsur warga, baik dari unsur kelompok sektoral yaitu (kelompok profesi/asosiasi /forum/lembaga masyarakat, maupun dari unsur kewilayahan (desa-kecamatan di seluruh kabupaten Karanganyar). Praktik *governance* juga memperhatikan

nilai-nilai lokal kemasyarakatanyang dianggap baik dan berguna. Konsep “Bersama” juga bermakna semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan yang lebih baik, isemua tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, onitoring dan evaluasi.

3. Memajukan

RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005–2025 menjelaskan kata “Maju” sebagai masyarakat Karanganyar yang menguasai ilmu dan teknologi, tercermin pada semakin berkembangnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya.

Merujuk pada misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2018-2023, Maju bermakna menjadi lebih baik dalam hal :

- a. Infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- b. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, lebih terjangkau atau murah, bahkan gratis dengan syarat dan ketentuan khusus.
- c. Kehidupan ekonomi masyarakat Karanganyar bertumpu pada ekonomi kerakyatan bertambah kuat, pertumbuhan wirausahawan mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak, UMKM tumbuh kuat, pengangguran berkurang, pendapatan per kapita meningkat, daya beli masyarakat meningkat,
- d. Desa menjadi pusat pertumbuhan, menjadi pusat kemajuan yang diharapkan bersama. Infrastruktur koneksitas dan aksesibiitas lancar. Internet dan teknologi informasi merata di semua desa sebagai pendukung produktivitas ekonomi, pelayanan publik, pelestarian dan pemasyarakatan nilai-nilai budaya lokal.

Kondisi masyarakat yang aman, tenteram, saling menghormati, saling bergotong royong membangun kesejahteraan bersama dalam keberagaman. Kemajuan masyarakat tidak mungkin terwujud tanpa ada peran pemerintah yang mengaturnya, menata atau memfasilitasi serta melaksanakannya secara tegas dan terarah. Memperhatikan hal ini kemajuan di bidang pemerintahan juga menjadi harapan dari semua pihak di Kabupaten Karanganyar. Memajukan juga bersifat aktif, diharapkan semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan karanganyar atau karanganyar yang lebih baik. Peran serta aktif masyarakat dapat dilihat dari berbagai peran yang dapat diambil atau dilaksanakan dari mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi demi kemajuan dan kebaikan karanganyar, bukan karena ingin saling menjatuhkan atau menguasai.

Jadi unsur “maju’ mencakup: (1) Maju di bidang infrastruktur; (2) Maju di bidang ekonomi; (3) Maju di Kualitas Sumber Daya Manusia; (4) Maju di Pembangunan Desa; (5) Maju dalam tata kelola pemerintahan & kemasyarakatan: Harmoni, tenteram, dan Partisipatif. MAJU dijadikan tagline sebagai akronim:

- M sebagai Mantap, artinya Infrastruktur wilayah Karanganyar kondisi mantap;
- A sebagai Aspiratif, artinya pemerintah terbuka mendengarkan aspirasi masyarakat dan stakeholder lain untuk bersama membangun Karanganyar;
- J sebagai Jujur, artinya pemerintah dan masyarakat menjunjung tinggi kejujuran dalam kata dan tindakan.
- U sebagai Unggul, artinya Pemerintah Daerah dan masyarakat berdaya saing tinggi.

4. Karanganyar

Karanganyar adalah wilayah Kabupaten Karanganyar yang meliputi 17 kecamatan, 15 kelurahan, 162 desa, serta penduduk yang hidup didalamnya. Kebaikan dan kemajuan harus dirasakan oleh semua penduduk dan semua wilayah di Kabupaten Karanganyar.

Misi:

Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi harus disampaikan secara jelas karena sebagai arahan dalam melaksanakan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023 adalah sebagai berikut.

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh

Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang. Pengertian infrastruktur menyeluruh dalam konteks seluruh rangkaian misi Kabupaten Karanganyar 2018-2023 ini juga mencakup infrastruktur non fisik, yaitu kerangka kebijakan reformasi birokrasi. Kerangka reformasi birokrasi memerlukan infrastruktur fisik teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Di samping itu juga memerlukan infrastruktur non fisik berupa kerangka kebijakan yang

mengatur struktur kelembagaan organisasi, penatalaksanaan organisasi, sistem pengawasan, sistem akuntabilitas, sistem pengembangan sumber daya manusia, dan kerangka peraturan perundangan.

2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan saja karena permasalahan pada masing-masing aspek kehidupan sangat kompleks. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang perekonomian yang baik tidak cukup hanya dengan pemberian modal tetapi juga perlu adanya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan penguatan posisi tawarnya. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat perlu dilakukan secara elegan tanpa menghambat atau mendiskriminasikan antara ekonomi yang kuat dan yang lemah. Untuk itu peran pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sangat diperlukan.

Pemberdayaan perekonomian masyarakat yang digarap secara serius akan memperlancar proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern dan efisien (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya).

3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis

Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka dengan adanya kebijakan wajib belajar bagi masyarakat, pemerintah dapat memberikan hak pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang menghambat warga yang wajib belajar dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan pendidikan yang murah. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah sudah selayaknya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta memadai.

4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan

Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, maka sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perekonomian harus diberdayakan mulai dari desa dengan tersedianya sumber daya aparat yang baik, serta terciptanya kesatuan dan persatuan kehidupan masyarakat.

5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

Perbedaan keyakinan tidak menjadi penyebab timbulnya keretakan dan memudarnya semangat kehidupan kekeluargaan di masyarakat. Perbedaan merupakan rahmat yang harus disyukuri, hal ini akan menumbuhkan rasa saling hormat menghormati antar sesama manusia. Terwujudnya perempuan Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian sangat mendukung terbentuknya keluarga dan generasi penerus yang sejahtera. Pemberdayaan pemuda sangat diperlukan dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalisme sehingga mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional. Pemberdayaan olahraga diperlukan sebagai upaya menciptakan budaya berolahraga yang diiringi dengan pengelolaan dan penataan semua aspek yang terlibat di jalur olahraga pendidikan, olahraga kreasi dan olahraga prestasi. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemuda dan olahraga harus dimulai dari tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan semangat kekeluargaan, persatuan, kesatuan serta masyarakat yang kokoh, aktif, unggul dan produktif.

Kecamatan Karanganyar menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan dalam mewujudkan misi kelima yaitu Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel. 2.1.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Karanganyar
Tahun 2018-2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan		Nilai SAKIP	skor	NA	NA	66.76	67	69	70	70
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	IKM	skor	NA	NA	70	72	74	75	75

Sumber : Renstra Kecamatan Karanganyar (2018-2023)

2.2. Ringkasan Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang diukur dengan indikator kinerja yang tertuang dalam rencana strategi Kecamatan Karanganyar Tahun 2018 – 2023.

a) Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan jangka menengah Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar adalah Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan.

b) Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Karanganyar.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Karanganyar beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini.

Tabel. 2.2.1
Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Karanganyar
Tahun 2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal
					2023
1	Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan		Nilai SAKIP	skor	70
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	IKM	skor	75

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun harus didukung dengan adanya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Karanganyar Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Program :

1. Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa.
Kegiatan pemberdayaan kelurahan.
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya Tujuan Strategis Kecamatan Karanganyar yang akan berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi. Rencana Kinerja Kecamatan Karanganyar pada Tahun 2023 dituangkan ke dalam program, yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang kemudian dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 26.943.812.491,- (*dua Puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah*) dengan komposisi : Anggaran pendukung langsung pencapaian Sasaran Strategis sebesar Rp. 26.223.392.978,- (*Dua Puluh enam milyar dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah*) dan anggaran pendukung tidak langsung sebesar Rp.1.769.243.349,- (*Satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah*) Masing- masing program kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam uraian kegiatan indikator hasil kinerja dan rencana tingkat capaian (target).

2.3. Ringkasan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2023.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kerja pegawai (SKP).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kecamatan Karanganyar dengan Bupati Karanganyar Tahun 2023, secara lengkap tercantum pada tabel berikut (Perjanjian Kinerja terlampir) :

Tabel. 2.3.1
Perjanjian Kinerja Kecamatan Karanganyar Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja
1	Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan		NILAI SAKIP	70
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	IKM	75

2.4 Rencana Anggaran

Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. 26.223.392.978,- (*Dua Puluh enam milyar dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah*) yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.5.211.692.491,- (*Lima milyar dua ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh dua empat ratus sembilan puluh satu rupiah*), dan belanja modal sebesar Rp. 21.732.120.000,- (*Dua puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh rupiah*). Rencana anggaran Kecamatan Karanganyar Tahun 2023, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.2.4.1

Rencana Anggaran Kecamatan Karanganyar Tahun 2023

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	7.560.198.491
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.898.013
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.796.243.349
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.928.800
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	113.225.480
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.033.909.319
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	549.408.900
	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.584.630
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	116.027.700
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	109.592.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanaka oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	6.435.700
3	Program Pembinaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	16.969.950.700
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	19.580.700
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	16.950.370.000
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	96.300.600
	Penyelenggaraan Urusan Pemeritahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah	96.300.600
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.201.335.000
	Fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	2.201.335.000

Sumber : DPPA Kecamatan Karanganyar (2023)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Skala Pengukuran

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan 4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Kecamatan Karanganyar tahun 2023 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan indikator kinerja utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Camat Karanganyar Tahun 2023 dan Rencana Strategis Kecamatan Karanganyar Tahun 2018 - 2023, yaitu IKM (indeks kepuasan masyarakat). IKM ini diperoleh dari penghitungan yang dilakukan pada survey kepuasan masyarakat (SKM) tiap tahunnya.

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata terimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsure
 Contoh : jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsure

$$\text{Bobot nilai rata-rata terimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

- a. menambah unsur yang dianggap relevan;
- b. memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Tabel.3.2.1
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi,
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,596	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Tabel.3.2.2

Dasbor SKM Karanganyar										
NO. RESP	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	NOTE
36376	4	4	3	4	3	3	4	3	4	Pelaku pelayanan publik harus lebih ramah dan sopan.
36493	4	4	4	4	4	3	4	4	4	Semoga lebih di tingkatkan lagi
45846	3	3	3	3	3	3	3	2	4	cukup baik
46014	3	4	3	4	3	3	4	3	4	sudah sangat baik
60168	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayan yg sudah sangat baik semoga stu dipertahankan ?????
60170	3	3	3	4	3	4	3	3	4	Perlu di tingkatkan lagi
60171	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Perlu ada bimbingan dari instansi tingkat atas agar sesuai dan menjadi tolok ukur
60172	3	3	3	4	3	3	3	3	4	Pelayanan menggunakan 3S kepada masyarakat
60173	3	3	3	4	3	3	3	3	4	Semoga semakin baik
60174	3	4	3	4	4	3	4	3	4	Ditingkatkan. Lagi pelayanannya
60175	3	3	3	4	3	3	3	3	3	Tingkatkan lagi dalam pelayanan
60176	3	3	3	4	3	3	3	3	4	.
60402	4	3	3	4	3	3	3	3	4	-
60405	3	3	3	4	3	3	3	3	1	Pelayanan sudah baik mohon ditingkatkan
60406	3	3	3	4	3	3	3	3	3	Tingkatkan
60407	3	3	3	4	3	3	3	3	3	Tingkatkan
60521	3	4	3	3	3	3	3	3	4	Semoga pelayanan yg baik bisa dipertahankan
60622	3	4	3	3	3	3	3	3	4	Semoga pelayanan yg baik bisa dipertahankan
60968	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Ditingkatkan lagi
60969	4	4	3	4	3	3	3	3	4	pertahankan pelayanan dengan senyum sapa salam
60970	3	3	3	4	3	3	3	3	4	Lanjutkan dan tingkatkan, sesuai sop
60973	4	4	3	4	3	3	3	3	4	Tingkatkan pelayanan kepada Masyarakat dengan agar semakin.mudah dan cepat

NO. RESP	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	NOTE
60974	3	3	3	4	3	3	3	3	4	Pelayanan yang baik untuk dipertahankan syukur ditingkatkan agar lebih baik lagi
60975	3	3	3	4	3	3	3	3	3	Untuk dapat dipertahankan kalau bisa ditingkatkan
60976	3	3	3	3	3	3	3	3	4	Pertahankan
60978	4	4	4	4	4	4	4	4	4	.
60979	3	3	3	4	3	3	3	2	3	Tingkatkan lagi pelayanan menjadi lebih baik
60980	3	3	3	2	3	3	3	2	3	Pelayanan pengurusan tanah cukup mahal
60981	4	3	3	4	4	4	4	3	4	Pertahankan menuju ke lebih baik lagi
60982	3	3	3	4	3	3	3	3	4	Tingkatkan pelayanan lbh baik lagi
60983	3	3	3	3	3	3	3	3	4	lanjutkan dan perlu evaluasi setiap akhir pekan
60984	3	3	3	4	4	3	3	3	4	Pertahankan pelayana yg maksimam
60985	3	3	3	4	4	3	3	3	4	Pertahankan pelayana yg maksimam
60986	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan lebih ditingkatkan lagi
60987	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sudah baik..
61229	3	3	3	4	3	3	3	3	4	Ditingkatkan.
61555	3	4	4	4	4	4	3	3	4	Semogaa makin maju
61556	4	3	3	4	3	3	3	3	4	Sangat memuaskan
61557	4	4	4	4	4	4	4	4	4	sudah bagus pertahankan
61558	3	3	3	4	3	3	4	3	4	Pelayanan yg sangat baik
61559	4	4	4	4	4	4	4	4	4	bagus dan cepat terimakasih
61560	4	4	4	4	4	4	4	4	4	sangat baik semoga kedepannya bisa lebih baik
61561	3	3	3	3	3	3	3	3	4	Tetap tersenyum dalam pelayanan
61562	4	4	4	4	4	4	4	4	4	sudah sangat bagus
61563	3	3	3	4	4	3	3	4	4	Terus pertahankan
61565	3	3	3	4	3	3	3	3	4	..
61574	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pertahankan kinerja

NO. RESP	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	NOTE
61577	4	4	4	4	4	4	4	4	4	joss pelayannva
61578	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Di tingkatkan lg lebih bsik lg
61580	4	4	4	4	4	4	4	4	4	bagus sekali
61581	4	4	4	4	4	4	4	4	4	sudah sangat bagus
61582	3	3	3	4	3	3	4	3	3	Bagus
61583	3	3	3	4	3	3	4	2	3	Good job
61584	4	4	4	4	4	4	4	4	4	sangat ramah,sopan dan cepat terimakasih
61586	4	4	3	4	3	3	3	3	4	Tingkatkan
61587	4	4	4	4	4	4	4	4	4	sudah sangat sesuai pelayanan
61588	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sangat baik dan tingkatkan
61589	4	4	4	4	4	4	4	4	4	cepat dan bagus terimakasih
61590	3	3	3	4	3	3	3	3	3	tingkatkan
61591	4	4	4	4	4	4	4	4	4	maturnuwun
61592	4	4	4	4	4	4	4	4	4	berkompeten dan cepat
61593	4	4	4	4	4	4	4	4	4	sudah sangat bagus pertanahkan
61594	3	3	3	4	3	3	3	3	4	Sudah baik dlm hal pelayanan
61595	3	4	3	4	3	4	3	3	4	Tingkatkan!
61596	3	3	3	4	4	4	4	3	4	Semoga semakin baik
61597	3	3	3	4	3	3	4	3	4	Pelayanan yg sangat baik
61602	3	3	3	4	3	3	3	3	4	Tingkatkan pelayanan dengan lebih baik
61603	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Makin di tingkatkan lg pelayanane
61604	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Makin di tingkatkan lg pelayansne
61611	4	4	4	4	4	4	4	4	4	tetap di pertahankan dan memberikan pelayanan terbaik

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja utama **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** diukur dengan melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM) tahun 2023 adalah 87.95. Target indeks kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2023 adalah 75 dan realisasi IKM yang tercapai pada tahun 2023 sebesar 87.95. Dari hasil tersebut apabila dibandingkan dengan target tahun 2021 maka kinerja yang tercapai adalah sebesar 117.26 % sehingga dengan kategori pelayanan “sangat baik”. Capaian kinerja indikator kinerja utama tercapai sebesar **117.26 %** atau kategori **sangat baik**, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 3.2.3
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi
1.	SAKIP	70	69.80
2.	IKM	75	87.95

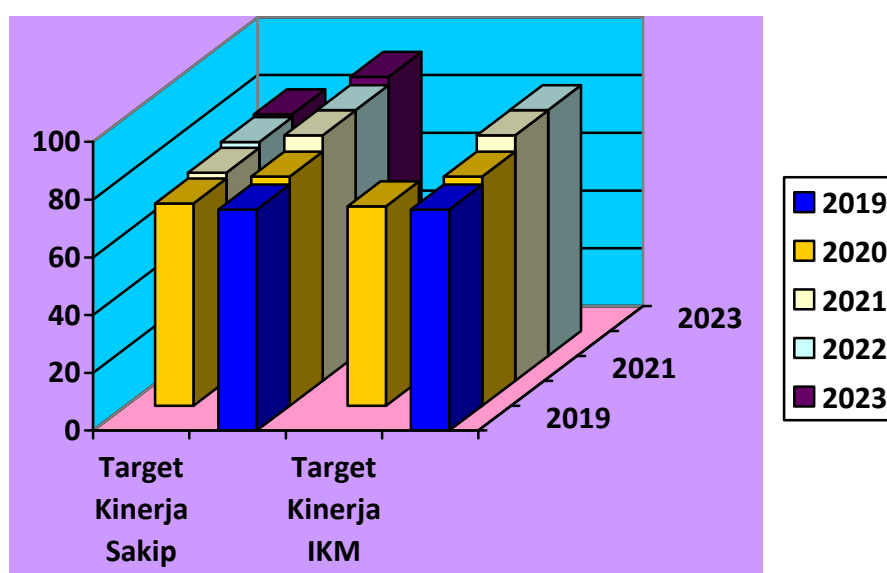
Apabila dibandingkan dengan Tahun 2022, capaian indikator kinerja utama untuk Nilai IKM pada Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 103.37 %. Sedangkan indikator kinerja utama Sakip di Tahun 2022 belum memenuhi target yang telah ditentukan, Realisasi perolehan nilai sakip di Tahun 2022 69.80 sedangkan target yang ditentukan sebesar 70, maka dapat disimpulkan baru terpenuhi sebesar 0.99 % dari target yang telah ditentukan. Hal –hal yang mempengaruhi target tidak tercapai antara lain adanya kertas kerja pengisian dan penilaian Sakip yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, upload satu data yang harus dilakukan guna penambahan nilai sakip secara open data di website OPD. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Karanganyar untuk Sakip belum memenuhi target dan IKM sudah tercapai secara efektif dan efisien dengan adanya peningkatan capaian kinerja di tahun 2023.

Tabel 3.2.4
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama SAKIP & IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Tahun 2019 - 2023

No	Tahun	Target	Capaian Kinerja	
			SAKIP	IKM
1	2019	NA	66.8	76.544
2	2020	70	69	79.286
3	2021	72	70.39	85.026
4	2022	74	69.80	85.075
5	2023	75	NA	87.95

Perbandingan capaian kinerja strategis Kecamatan Karanganyar Tahun 2019 dan tahun 2023 apabila di gambarkan dalam grafik akan terlihat seperti grafik berikut ini :

Grafik 3.2.1
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama SAKIP Dan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)



3.3. Pengukuran Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Karanganyar Tahun 2023 dan Rencana Strategis Kecamatan Karanganyar tahun 2018 – 2023, sasaran strategis yang mendukung pencapaian tujuan hanya ada satu sasaran strategis, yaitu :

Sasaran Strategis : Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan

Tolok ukur capaian Sasaran Strategis ini adalah skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang merupakan hasil penghitungan **survey** kepuasan masyarakat. Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan

No.	Indikator Kinerja	Real. 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra (2023)	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2023)
			Target	Real	% Capaian		
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	SAKIP	69.80	70	69.80	0,99%	70	0,99%
2.	IKM	85.075	75	87.95	117.26%	75	117.26%
Prosentase Capaian Sasaran Strategis					118,25%		118.25%

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja utama **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan** diukur dengan melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM). Target indeks kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2023 adalah 75 dan realisasi IKM yang tercapai pada tahun 2023 sebesar 87.95. Dari hasil survey kepuasan konsumen yang dilakukan oleh Kecamatan Karanganyar pada tahun 2023 diperoleh skor Indeks kepuasan konsumen sebesar 87.95 apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 maka kinerja yang tercapai adalah sebesar 117.26% sehingga dengan kategori pelayanan “sangat baik”. Capaian kinerja indikator pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan tercapai sebesar **117.26 %** atau kategori **sangat baik**, dari hasil penghitungan dengan menggunakan rumus berikut ini :

$$\begin{aligned}\text{Capaian Kinerja} &= \text{Realisasi} : \text{target kinerja} \times 100\% \\ &= 87.95 : 75 \times 100\% \\ &= \mathbf{117.26\%}\end{aligned}$$

Kemudian capaian kinerja Tahun 2023 pada Sasaran Strategis meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada target capaian kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah tercapai melebihi target yaitu **118.15%**, karena pada akhir perencanaan strategis hanya di targetkan IKM sebesar 75 padahal tahun 2023 sudah tercapai sebesar 87.95. Capaian Kinerja tersebut diperoleh dari penghitungan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Capaian Kinerja terhadap} &= \text{capaian kinerja th n} : \text{target akhir renstra} \times \\ & 100\% \text{ target akhir renstra} \\ &= 87.95 : 75 \times 100\% \\ &= \mathbf{117.26\%}\end{aligned}$$

Tercapainya sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan didukung adanya pelaksanaan Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Berikut ini adalah beberapa foto-foto kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



2. Koordinasi Kegiatan Peberdayaan Desa



3. Pembinaan Administrasi Kepegawaian



4. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional



5. Pembinaan Kerukunan antar suku dan Intrasuku , umat Beragama, ras, golongan dan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional dan Nasional





3.4 Realisasi Anggaran

Konsumsi anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis **Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan** pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah sebesar Rp. 116.027.700,- atau 98,67%, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 95.550.600 atau 99,22%, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa Sebesar Rp.2.201.335.000,- atau 100% sehingga total konsumsi anggaran sebesar **Rp. 26.150.870.146,-** atau **97.05%** dari total anggaran Rp.**26.943.812.491,-** terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.792.942.345,- atau **2.94%**.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan** adalah sebagai berikut :

1. Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerj aperatur daerah yang ada di kecamatan
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. 26.943.812.491,- (*dua puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah*) yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar sebesar Rp. 5.211.692.491,- (*Lima milyar da ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah*), dan belanja modal sebesar Rp. 21.732.120.000 (*Dua puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah*). Dari total anggaran baik belanja operasi maupun belanja modal terealisasi sebesar Rp.26.223.392.978,- (*Dua puluh enam milyar dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah*) atau sebesar 97,32%, sisa anggaran Rp.720.419.513,- (*Tujuh ratus dua puluh juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga belas rupiah*) atau sebesar 2,6%, untuk belanja operasi terealisasi sebesar Rp. 5.126.113.978,- (*Lima milyar seratus dua pulh enam juta seratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah*) atau sebesar 98.35% dan selisih anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 85.578.513,- (*Delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga belas rupiah*) atau sebesar 1.64%, sedangkan untuk belanja modal terealisasi sebesar Rp. 21.097.279.000,- (*dua puluh satu milyar sembilan puluh tujuh juta duua ratus tujuh puluh sembilan ribuu rupiah*) atau sebesar 97.07% dan selisih anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 634.841.000,- (*Enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah*) atau sebesar 2.92%.

Tabel. 3.4.1

Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Karanganyar Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja	26.943.812.491	26.223.392.978	97.32
1	Belanja Operasi	5.211.692.491	5.126.113.978	98.35
	- Belanja Pegawai	1.769.243.349	1.663.691.673	94.03
	- Belanja Barang dan jasa	3.442.449.142	3.462.422.305	
2	Belanja Modal	21.732.120.000	21.097.279.000	97.07

Sumber : LRA Kecamatan Karanganyar Tahun 2023

Realisasi Program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Karanganyar Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.4.2
Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Karanganyar
Per Program dan Kegiatan
Tahun 2023

NO.	PROGRAM & KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.560.198.491	6.814.590.178	90.13
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.898.013	25.898.013	100
	2. Administrasi Keuangan Perangkat daerah	1.769.243.349	1.663.691.673	94.03
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	20.928.800	20.928.800	100
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	113.225.480	113.125.441	99.91
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.030.750.000	4.403.511.500	87.53
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	549.408.900	542.125.251	98.67
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	47.584.630	45.309.500	95.21
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	116.027.700	115.487.700	99.53
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	109.592.000	109.052.000	99.50
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	6.435.700	6.435.700	100
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	16.701.370.000	16.701.370.000	100
	Koordinasi Kegiatan	19.580.700	19.580.700	100

	Pemberdayaan Desa			
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	16.950.370.000	16.975.369.800	
IV	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	96.300.600	95.550.600	99.22
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	96.300.600	95.550.600	99.22
V	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.201.335.000	2.196.070.000	99.76
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.201.335.000	2.196.070.000	99.76

Sumber ; Laporan POK Kecamatan Karanganyar per Desember 2023 (2023)

Realisasi anggaran Kecamatan Karanganyar Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Program/Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	13.858.238.900	13.111.832.221	94.61	2,420,349,929.00	2.259.083.652	99.37	7.560.198.491	6.814.590.178	90.13
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.477.450	19.477.450	100	37,266,700.00	37,266,700.00	100	25.898.013	25.898.013	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.477.450	14.477.450	100	19,500,000.00	19,500,000.00	100	13.432.713	13.432.713	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	5.000.000	100	17.766.700	17.766.700	100	12.465.300	12.465.300	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.032.569.000	10.358.278.926	93.89	1.723.717.864	1.608.183.524	93.30	1.769.243.349	1.663.691.673	94.03
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.032.569.000	10.358.278.926	93.89	1.723.717.864	1.608.183.524	93.30	1.769.243.349	1.663.691.673	94.03
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.125.000	10.125.000	100	25.750.000	25.750.000	100	20.928.800	20.928.800	100
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.125.000	10.125.000	100	15.750.000	15.750.000	100	10.500.000	10.500.000	100
	Pengadaan dan Pengolahan Administrasi				10.000.000	10.000.000	100	10.428.000	10.428.000	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	453.948.750	441.155.521	97.18	55.504.915	55.504.915	100	113.225.480	113.125.441	99.91
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	53.440.900	53.440.900	100	7.995.572	7.995.572	100	14.569.850	14.569.850	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	144.327.100	143.737.000	99.59	13.816.943	13.816.943	100	16.861.130	16.861.091	99.99
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	56.153.700	56.153.700	100						
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							10.590.500	10.590.500	100
	Penyediaan bahan cetakan dan Penggandaan	92.267.050	90.741.921	98.35	11.157.400	11.157.400	100	16.839.800	16.839.800	100

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.940.000	20.820.000	99.43	1.920.000	1.920.000	100	1.380.000	1.380.000	100
Fasilitasi Kunjuungan Tamu	2.700.000	2.700.000	100						
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.120.000	73.562.000	87.45	20.615.000	20.615.000	100	46.310.000	42.210.000	91.14
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							6.674.200	6.674.200	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Milik Pemerintah	438.450.000	435.631.800	99.36	27.596.050	27.596.050	100	5.033.909.319	4.403.511.500	87.53
Pengadaan Mebel	136.300.000	134.835.000	98.93	4.000.000	4.000.000	100	4.500.000	4.500.000	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	226.665.600	225.661.000	99.56	23.596.050	23.596.050	100	25.850.000	24.550.000	94.97
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							5.000.000.000	4.370.909.000	87.41
Pengadaan sarana dan prasarana kantor atau bangunan lainnya							3.559.319	3.552.500	99.80
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.342.700	21.445.800	95.99						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.617.557.600	1.569.136.888	97.01	467.760.400	467.760.400	90.60	549.408.900	542.125.251	98.67
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	724.771.000	713.984.600	98.51	83.880.000	83.880.000	100	126.700.000	126.240.000	99.63
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	219.220.000	186.169.288	84.92	32.600.000	32.600.000	96.73	43.600.000	36.811.651	84.43
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.905.100	21.851.500	99.30	7.840.000	7.840.000	100	14.048.900	14.033.600	99.89
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	651.661.500	647.131.500	99.30	343.440.000	343.440.000	100	365.040.000	365.040.000	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	286.111.100	278.026.636	97.17	82.754.000	81.010.000	97.89	47.584.630	45.309.500	95.21
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.152.500	57.312.782	89.34	29.345.500	27.602.000	94.06	27.705.000	26.909.500	97.12
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.946.00	54.442.654	99.12	19.615.000	19.615.000	100	18.400.000	18.400.000	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	71.100.000	71.100.000	100	33.793.500	33.793.500	100			

	Kantor dan Bangunan Lainnya									
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	71.569.500	52.342.700	73.23						
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.342.700	22.342.700	100				1.479.630	1.479.000	99.95
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	64.000.000	63.600.000	99.38	99.598.800	99.119.300	99.52	116.027.700	109.052.000	93.98
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	64.000.000	59.600.000	99.33	94.866.000	94.386.500	99.49	109.592.000	109.052.000	93.98
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	60.000.000	59.600.000	99.33	94.866.000	94.386.500	99.49	109.592.000	109.052.000	93.98
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	4.000.000	4.000.000	100	4.732.800	4.732.800	100	6.435.700	6.435.700	100
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Wilayah Kecamatan	4.000.000	4.000.000	100	4.732.800	4.732.800	100	6.435.700	6.435.700	100
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Desa	12.151.429.000	12.151.429.000	100	15.980.285.850	15.974.059.850	99.96	16.969.950.700	16.701.370.000	100
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	117.753.600	117.753.600	100	31.685.850	31.685.850	100	19.580.000	19.580.000	100
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12.185.750	12.185.750	100			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	117.753.600	117.753.600	100	19.500.100	19.500.100	100	19.850.700	19.580.700	100
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12.033.675.400	12.033.675.400	100	15.948.600.000	15.948.600.000	100	16.950.370.000	16.726.370.000	98.67

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	51.326.000	51.326.000	100				20.000.000	20.000.000	100
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	77.499.400	77.499.400	100						
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	11.890.000.000	11.890.000.000	100	15.944.000.000	15.944.000.000	100	16.701.370.000	16.726.370.000	100
	Evaluasi Kelurahan	8.000.000	8.000.000	100	4.600.000	4.600.000	100	5.800.000	5.800.000	100
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6.850.000	6.850.000	100				223.200.000	223.200.000	100
4.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	625.000.000	600.909.475	96.15	4.999.370	4.999.370	100			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	625.000.000	600.909.475	96.15	4.999.370	4.999.370	100			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	625.000.000	600.909.475	96.15	4.999.370	4.999.370	100			
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	312.291.800	308.607.800	98.82	150.400.000	144.855.000	96.31	96.300.600	95.550.600	99.22
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	312.291.800	308.607.800	98.82	150.400.000	144.855.000	96.31	96.300.600	95.550.600	99.22
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	180.241.700	176.602.700	97.98	93.000.000	92.955.000	99.95	30.800.000	30.800.000	100

	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	89.650.100	89.650.100	99.95	10.000.000	10.000.000	100	10.037.000	10.037.000	100
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	10.000.000	10.000.000	100	15.000.000	9.500.000	63.33	23.063.600	22.313.600	96.74
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	32.400.000	32.400.000	100	32.400.000	32.400.000	100	32.400.000	32.400.000	100
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.802.905.300	2.801.745.300	99.96	2.187.500.000	2.187.500.000	100	2.201.335.000	2.196.070.000	99.76
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.802.905.300	2.801.745.300	99.96	2.187.500.000	2.187.500.000	100	2.201.335.000	2.196.070.000	99.76
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.770.115.300	2.770.115.300	100	2.187.500.000	2.187.500.000	100	2.201.335.000	2.196.070.000	99.76
	Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	19.350.000	19.350.000	100						
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	13.440.000	13.440.000	69.64						

Sumber ; Laporan POK Kecamatan Karanganyar Desember 2021 – 2023 (2023)

Penggunaan anggaran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.4.3
Realisasi Anggaran Pendukung Pencapaian Sasaran

Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	116.027.700	115.487.700	99.53
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	16.701.370.000	16.701.370.000	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	96.300.600	95.550.600	99.22
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.201.335.000	2.196.070.000	99.76
JUMLAH TOTAL		19.115.033.300	19.108.478.300	99.96

Pagu anggaran pendukung pencapaian kinerja sasaran strategis sebesar Rp. **19.115.033.300,-** (*sembilan belas milyar seratus lima belas juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah*), konsumsi anggaran dalam pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023 sebesar Rp. **19.108.478.300** (*sembilan belas juta seratus delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah*) atau **99.96%**, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 6.555.000,- atau **0,003%**.

Dari hasil tersebut apabila dibandingkan dengan tahun lalu yaitu tahun 2023, terjadi peningkatan efisiensi anggaran. Hal ini dikarenakan adanya Penambahan pagu anggaran di pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur kelurahan.

5.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Capaian Kinerja

Analisis efisiensi penggunaan anggaran atau sumber daya dalam pencapaian target kinerja pendukung sasaran strategis Kecamatan Karanganyar Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.5.1
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Target Kinerja

Tujuan	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penggunaan Sumber Daya (Rp)	Efisiensi (%)
1	2	4	5	6
Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	90.13	6.814.590.178	9.86

Dari tabel 3.5.1 dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Karanganyar telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan bahkan capaian kinerja melebihi target yaitu sebesar 90.13%. Untuk mencapai kinerja sebesar itu. Anggaran pendukung sasaran strategis Kecamatan Karanganyar tahun 2022 yaitu sebesar Rp 6.814.590.178,- (*enam milyar delapan ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah*), konsumsi anggaran dalam pencapaian target kinerja sasaran strategis pada tahun 2023 sebesar Rp.745.608.313,- (*tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan tiga ratus tiga belas rupiah*) atau **9,86%**.

BAB IV

P E N U T U P

3.1 Kesimpulan

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Karanganyar sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Karanganyar dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Karanganyar mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan seefisien mungkin.

Pada tahun anggaran 2023, Kecamatan Karanganyar telah berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan capaian kinerja sasaran strategis yang sebagian besar memperoleh kategori baik. Capaian Kinerja Kecamatan Karanganyar Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pengukuran rata - rata capaian kinerja seluruh Sasaran Strategis Kecamatan Karanganyar Tahun 2023 sebesar **118,15%. (sangat baik)**.
2. Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan sebesar **118,15% (sangat baik)**.

Capaian indikator kinerja utama **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan** diukur dengan melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM). Target indeks kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2021 adalah 72 dan realisasi IKM yang tercapai pada tahun 2023 sebesar 85.075. Dari hasil survey kepuasan konsumen yang dilakukan oleh Kecamatan Karanganyar pada tahun 2022 diperoleh skor Indeks kepuasan konsumen sebesar 85.075 apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 maka kinerja yang tercapai adalah sebesar **117,26 %** sehingga dengan kategori pelayanan "**sangat baik**". Capaian kinerja indikator pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan tercapai sebesar **117.26 %** atau kategori "**sangat baik**".

Konsumsi anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis **Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan** pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah sebesar Rp.115.487.700,- atau 99.53%, Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan sebesar Rp.16.701.370.000 atau 100 %, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp.96.300.600,- atau 99.22%, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa Sebesar Rp. 2.196.070.000,- atau 100%. Realiasi Rp. **26.223.392.978** (*dua puluh enam milyar dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah*) atau **97.32%**, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 720.419.513,- atau **2.67%**.

Dalam mencapai kinerja Sasaran strategis Kecamatan Karanganyar hampir tidak ada permasalahan yang cukup berarti, namun kegiatan – kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis harus di tingkatkan sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih bagus, sebagai koordinator pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Karanganyar harus meningkatkan kualitas pelayanan dengan meningkatkan kualitas sumber daya maupun prasarannya.

3.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Karanganyar di masa mendatang antara lain :

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai standar;
3. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Kecamatan Karanganyar Tahun 2023, semoga bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk program kerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Karanganyar, Januari 2024


PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN KARANGANYAR
SUTARMO, M.M.
Nip. 19700622 199003 1 002

